

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 <u>25</u> 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 15	
TAHUN 2004	

# DPR Desak Polri Tuntaskan Kasus Buyat

JAKARTA (Media): Komisi VIII DPR meminta Polri untuk menuntaskan penyidikan pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, dan mengingatkan pemerintah agar memberikan dukungan dalam penyelesaian kasus itu.

Demikian salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) soal penanganan kasus pencemaran Teluk Buyat antara Komisi VIII dan pihak-pihak terkait yang dibacakan Wakil

Ketua Komisi VIII Zainal Arifin di Jakarta, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nabel Makarim, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Suyitno Landung, Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Umar Fachmi, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon S, Dewan Pendiri

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus, serta Dirut PT Newmont Minahasa Raya (NMR) Richard B Ness.

Pada pertemuan selama 4,5 jam itu, terlontar keinginan kuat Dewan menindaklanjuti hasil kesimpulan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri yang menyatakan telah terjadi pencemaran di Teluk Buyat dan Ratatotok, Sulut.

Di samping itu, anggota Dewan juga kecewa atas kelam-

banan pemerintah mengatasi kasus ini. Komisi VIII juga mendesak Depkes untuk membiayai ongkos perawatan kesehatan warga Buyat.

Sementara itu, Suyitno Landung mengatakan Puslabfor telah merampungkan hasil penelitian seluruh sampel kasus pencemaran Teluk Buyat dan Ratatotok.

"Seluruh sampel telah usai diteliti dan hasilnya tengah kita analisis bersama para ahli."

Menurut Suyitno, dari sampel tersebut secara keseluruhan konsentrasi merkuri (Hg) dan arsenik (As) telah melampaui baku mutu. Untuk air laut dan air sungai, misalnya, pencemaran Hg dan As di Sungai Buyat dan Teluk Buyat telah melampaui baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Suyitno mencontohkan kandungan Hg di hilir Sungai Buyat mencapai 0,0012 *part per million* (ppm) dan di hilir Teluk Buyat 0,004 ppm.

Mengenai pemeriksaan terhadap saksi, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polri Brigjen Suharto menyatakan, penyidik telah memeriksa 24 orang di Mabes Polri dan 36 di Polda Sulut. Dari jumlah itu, dua orang pejabat PT NMR di Mabes Polri dan dua orang di Polda Sulut.

Dalam RDPU yang juga diikuti 18 warga Buyat, Nabel menyatakan kebijakan yang akan

diambil pemerintah akan sangat bergantung pada hasil kesimpulan tim terpadu Kementerian LH yang kini tengah merumuskan strategi lanjutan atas kasus Buyat pada sekitar akhir Agustus ini.

Sementara itu, sidang gugatan kasus warga Buyat terhadap Menteri Kesehatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, ditunda karena tim kuasa hukum tergugat belum mendapat surat kuasa resmi. (YD/Fud/Emh/V-2)